

PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM MENDAMPINGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

Eko Yudianto Yunus
Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Panca Marga Probolinggo

ABSTRAK

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertujuan untuk menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran. Hal ini menjadi kunci untuk mensejahterakan masyarakat di kecamatan Kanigaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan baik dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Kanigaran. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kerjasama antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK dengan pihak pemerintah, TKSK di wilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Dinas Sosial adalah Memberikan bantuan berupa program sembako, rutilahu, kambing di setiap wilayah, dan memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang dijalankan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Kata Kunci : Peran, TKSK, Pendampingan, PMKS

ABSTRACT

The role of the Sub-district Social Welfare Staff (TKSK) aims to make the distribution of aid from the government to poor families or people with social welfare problems (PMKS) in Kanigaran sub-district a success. This is the key to the welfare of the people in Kanigaran sub-district. This study aims to determine the role of Sub-district Social Welfare Workers (TKSK) in assisting Persons with Social Welfare Problems (PMKS), and to find out what are the supporting and inhibiting factors of implementing the role of District Social Welfare Workers (TKSK) in facilitating Persons with Social Welfare Problems (PMKS). Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of the District Social Welfare Workers (TKSK) had not played a good role in facilitating the community with Social Welfare Problems (PMKS) in Kanigaran sub-district. and also assistance. This occurs due to the limited ability of the Sub-district Social Welfare Workers (TKSK) in handling communities with Social Welfare Problems (PMKS) in collaboration between the TKSK Subdistrict Social Welfare Workers and the government, the TKSK in the area, and fellow District Social Welfare Workers (TKSK). The form of assistance provided by the Government or the Social Service is to provide assistance in the form of groceries, rutilahu, goat programs in each region, and providing business capital according to the needs of the people they are living in Kanigaran District, Probolinggo City.

Keywords : Role, TKSK, Accompany, PMKS

PENDAHULUAN

Masalah Kemiskinan saat ini menjadi hal yang penting di negeri ini, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada permasalahan ini. Masalah kemiskinan sangat kompleks, saling keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, budaya serta aspek-aspek lainnya. Kemiskinan selalu

menjadi masalah fenomenal di dunia ini, terutama di negara berkembang seperti Indonesia pada khususnya. Masalah kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara perlu dimaknai sebagai suatu masalah yang sangat serius untuk ditangani secara maksimal, karena saat ini kemiskinan menyebabkan

banyak masyarakat terutama di negeri ini mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Fokus persoalan kemiskinan ini dipicu oleh rendahnya pendidikan masyarakat yang masih tinggi serta angka pengangguran yang membengkak. Kondisi Pengangguran yang dialami masyarakat saat inilah membuat mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu muncul. Masalah kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan, jika pendapatan anggota masyarakat ini tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat akan kebutuhan pokok yang diperlukan, kondisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan kebutuhan hidup manusia untuk dapat hidup lebih baik.

Persoalan terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan, dimana tidak meratanya distribusi pendapatan memunculkan terjadinya ketimpangan masalah pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut akan membuat permasalahan tidak terselesaikan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi buruk terhadap kondisi sosial politik di suatu negara. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya menjadi masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang saja, namun negara maju juga tidak lepas dari permasalahan tersebut. Perbedaan terletak pada besar dan kecilnya jumlah kesenjangan dan kemiskinan tersebut serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya karena luas wilayah dan jumlah penduduk negara bersangkutan.

Semakin besarnya tingkat kemiskinan, semakin tinggi pula kesulitan atau permasalahan hidup yang harus dihadapi. Kalau kita melihat negara-negara maju, mereka menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan serta angka kemiskinan yang relatif cukup kecil dibanding negara-negara sedang berkembang dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP mereka juga relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah itu sendiri di suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Pengambilan kebijakan

yang salah dalam pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman negara lain, justru akan berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan. Demikian pula adanya arus perputaran perekonomian dari waktu ke waktu di dalam sebuah perekonomian. Namun, bentuk arus untuk perekonomian dimana pemerintah ikut di dalamnya sehingga bukan perekonomian swasta lagi tidaklah akan menyimpang dari prinsip itu, mengingat pemerintah merupakan unsur pengatur dan penyeimbang perekonomian secara keseluruhan.

Menurut data (BPS) Badan Pusat Statistik Nasional. Pada tahun 2018 tercatat penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,95 juta atau 9,82% dari total jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, hal itu mengalami penurunan angka kemiskinan pada tahun 2017 menjadi 26,58 juta orang atau 10,12% dari total penduduk. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di negeri ini mencapai 9.78%, jumlah ini meningkat 0,56% dari tahun 2019. Melihat data tersebut, negara ini telah melaksanakan berbagai macam program untuk memberantas kemiskinan di negeri ini. Di antaranya, Program Bantuan Sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dll, Sementara itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo pada tahun 2018 sebesar 7,20% dari jumlah penduduk 16.90 ribu jiwa dan pada tahun 2019 penduduk miskin turun menjadi 16.37 ribu jiwa atau 6.91% yang tersebar di Lima kecamatan yang ada di Kota Probolinggo.

Pemerintah pada saat ini telah banyak mengeluarkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dan paling utama pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan maupun sandang yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah dengan melaksanakan Program Subsidi Pangan dalam hal ini berupa beras. Pada perkembangannya program beras bersubsidi ini diperluas fungsinya sebagai bagian dari salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pokok dan dikenal dengan sebutan Sastra yang mulai berjalan pada tahun 2002, namun pada tahun 2017 istilah raskin diganti dengan sebutan

Rastra. Upaya pemerintah dengan mengganti istilah Raskin menjadi Rastra saat ini adalah fokus pada peningkatan kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Perbaikan itu dilakukan karena selama ini Pemerintah banyak menerima kritikan soal kualitas Raskin atau Rastra yang cenderung buruk. Dalam perkembangannya, sesuai arahan presiden setiap bantuan sosial disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan memantau, mengontrol dan meminimalisir penyimpangan.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK merupakan salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri merupakan salah satu pilar partisipasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perorangan maupun perusahaan/ kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator atau manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu kepala camat dalam melaksanakan/ menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo sampai saat ini jumlah TKSK di Kota Probolinggo yang telah mengikuti

pelatihan tingkat Provinsi berjumlah 5 orang dimana masing TKSK berlokasi di satu kecamatan. Dengan jumlah yg terbatas itu TKSK dituntut untuk menghasilkan pelayanan bidang sosial yang semakin dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah masing-masing yang lebih luas di bidang kesejahteraan sosial. Selaras dengan perkembangan persoalan kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial bukan hanya di perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan. Kenyataan bahwa masalah-masalah kesejahteraan sosial di Indonesia semakin lama semakin kompleks sehingga penanganannya pun memerlukan tenaga-tenaga yang profesional, salah satu tenaga profesional ini salah satunya adalah TKSK.

Hingga saat ini, masalah sosial masih biasa digunakan untuk menganalisis suatu fenomena yang muncul dan berkembang dalam lingkungan sekitar dimana fenomena tersebut dianggap kurang bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Masalah sosial lahir tergantung pada dinamika dan perkembangan lingkungan dimana suatu masyarakat berada. Biasanya ketika suatu lingkungan mengalami perkembangan, baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, sekalipun ada proses deferensiasi struktural dan kultural tetap saja memunculkan ketidakstabilan, terlebih perubahan tersebut datang secara tiba-tiba dan sangat cepat. Dalam kondisi ini, tidak semua lingkungan masyarakat dapat menerima dan beradaptasi secara cepat. Ketidaksiapan lingkungan menerima perubahan tersebut yang menjadi pemicu lahirnya suatu masalah sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melihat Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya melalui beberapa program antara lain: program penanganan Anak Dengan Kecacatan (ADK), Penyandang Disabilitas (PD), Pengemis, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Anak Yatim (Piatu atau Yatim Piatu),

Keluarga Rumah Berumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Keluarga Rentan, Lanjut Usia Terlantar (LUT), Fakir Miskin (FM) serta Pendampingan Bantuan Sembako.

KAJIAN PUSTAKA

Perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, antropologi dan sosiologi melahirkan teori peran. Korelasi peran dengan ketiga disiplin ilmu tersebut adalah ketiganya sama-sama menggunakan istilah peran dalam dunia teatrikal pada sejarah teater dimana seseorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu (Sarwono, 2015:215). Setiap peran memiliki identitas masing-masing mengenai siapa dan bagaimana seseorang melakukannya, tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Antropolog Robert Linton, pada tahun 1936 sukses mengembangkan teori peran yang mendeskripsikan hubungan sosial (interaksi) yang merupakan pengistilahan bagi aktor pemeran sesuai dengan apa yang ditetapkan kebudayaan. Harapan-harapan dari sebuah peran tersebut akan menuntun seseorang untuk berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Dari perspektif teori peran, apabila seseorang memiliki peran tertentu seperti Camat, mahasiswa, anak, orang tua, dan peran-peran lainnya, maka orang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran yang disandangnya (Mustafa, 2011). Konsep kesejahteraan sosial (kesos) di Indonesia sebenarnya sudah lama dikenal sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang no. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial dirumuskan sebagai berikut: Suatu kondisi kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan baik jasmani, rohani dan sosial bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila serta di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian Negara terhadap kaum lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2002; Swasono, 2004).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan kualitatif penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata, tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupaya menghimpun data, mengolah data dan menganalisis data secara kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang Peran TKSK. Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya sebagai mitra dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mendapat perlakuan bahwa kurangnya pengakuan dari pemerintah daerah terhadap apa yang menjadi kewenangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai mitra Dinas Sosial PPPA. Dengan demikian, yang menjadi faktor penghambat anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya adalah luasnya jangkauan kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mencakup seluruh Kelurahan yang ada di suatu kecamatan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempertimbangkan jumlah tenaga kesejahteraan sosial di tiap kecamatan. Sedangkan untuk faktor pendukung, TKSK tumbuh dari kalangan masyarakat sendiri seperti kelompok-kelompok arisan, kelompok Karang taruna dan sebagainya. Hal ini sudah berjalan dengan semestinya dimana birokrasi dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo memberikan kewenangan kepada TKSK selaku pihak yang bekerja di lapisan terbawah masyarakat yang merupakan

local community organization dalam memberikan pendampingan untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang mereka di wilayah kerjanya.

Pelaksanaan Peran TKSK di Wilayah Kerja

Dalam peran pekerjaan sosial, TKSK memiliki banyak lini yang dilakukan tergantung konteksnya. Secara umum peran pekerjaan sosial khususnya TKSK dapat berperan sebagai pendamping, mediator, pembimbing, perencana dan pemecahan masalah. Kinerja pekerja sosial dalam hal ini TKSK dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi setiap permasalahan yang telah dialami, dalam hal ini TKSK melakukan beberapa cara yang baik itu dalam bimbingan keluarga, bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, dari kegiatan tersebut nampak peran TKSK sebagai pendamping. Menurut (Kartasasmita, 1997:15-17) untuk dapat melaksanakan perannya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial diperlukan pendampingan. Masalah penduduk kemiskinan pada umumnya memiliki keterbatasan dalam pengembangan dirinya. Oleh sebab itu, diperlukan pendampingan untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, maupun dinamisor. Dengan lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam

kehidupan dan kegiatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh TKSK, mereka melakukan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial ketika diberikan bantuan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo maupun Provinsi Jawa timur.

2. Memfasilitasi seseorang dengan jaringan sosial yang dimiliki mereka untuk menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, pada fungsi ini sangat membantu masyarakat agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan koordinasi dengan organisasi sosial yang ada di Kota Probolinggo agar masyarakat mendapat pelayanan yang sebaik baiknya.
3. Meningkatkan kinerja dan efektifitas lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial dengan baik, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa TKSK belum diberikan kewenangan penuh dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS, dalam proses pembinaan, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima bantuan atau pembinaan, sedangkan proses bantuan dan pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial dan PPPA.
4. Menjalankan dan mengembangkan perangkat regulasi atau peraturan yang mampu menciptakan situasi yang cukup kondusif bagi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial dan pada fungsi ini belum bisa berjalan dengan baik karena TKSK oleh Dinas Sosial dan PPPA belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo. Peran TKSK dalam ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian didampingi dan ditindaklanjuti dengan baik.

PMKS adalah seseorang, keluarga/kelompok masyarakat memiliki adanya suatu hambatan, kesulitan atau gangguan untuk tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmaniah, rohaniyah dan sosial secara wajar dan memadai. Hambatan atau kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, Kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan serta perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Apapun jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran dalam 6 (enam) Kelurahan, di Kecamatan Kanigaran terdapat masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hampir semua sama masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Kanigaran cenderung masyarakat tergolong kedalam Fakir Miskin (FM). Kemiskinan dimaknai sebagai suatu gejala kurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Anggota masyarakat dikategorikan sebagai masyarakat miskin apabila pendapatan anggota masyarakat tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan dasar sehari-hari yang meliputi sandang, pangan dan papan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan pada hakekatnya menunjuk pada ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Peran TKSK dalam Mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan tinggi tingkat permasalahan sosialnya. Pemerintah daerah Kota Probolinggo hampir setiap tahun membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Berdasarkan data BPS Kota Probolinggo jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 20.204 jiwa dan merupakan yang tertinggi diantara kecamatan yang lain, dengan tingginya angka kemiskinan di kecamatan Kanigaran maka dapat disimpulkan

bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kanigaran masih tergolong rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangatlah strategis dalam menunjang program program Dinas Sosial dan PPPA di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan pekerja sosial profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sendiri merupakan salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga adalah warga masyarakat kelurahan yang telah memperoleh bimbingan atau pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator atau manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Adapun peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam proses pendampingan dan peranannya sebagai pekerja sosial beraneka ragam

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Peran Tenaga kesejahteraan Sosial secara umum sebagai berikut:

1. Fasilitator atau Perencanaan dan Pemecahan Masalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya atau fungsinya sebagai fasilitator atau pendamping terhadap masyarakat demi kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan Kecamatan Kanigaran secara menyeluruh ke semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Kanigaran. Serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merancang perencanaan dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti yang telah dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) membantu dalam membuat proposal yaitu ajuan permohonan bantuan ke pihak lembaga pemerintahan daerah sesuai dengan permintaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau masalah yang sedang dihadapi.
2. Media Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Kanigaran merupakan pihak netral yang membantu para pihak khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian yang dihadapi oleh masyarakat. Ciri utama dari seorang mediator adalah membantu pihak-pihak terkait tanpa menggunakan cara-cara yang dipaksakan atau memutuskan penyelesaian. Jadi, mediator hanya berperan membantu para pihak terkait tanpa memaksakan kehendak atau memutuskan permasalahan berdasarkan persepsi mediator sendiri terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Pembimbing

Selain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan sebagai fasilitator atau pendamping, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga berperan pembimbing atau membimbing masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran untuk benar-benar menjalankan bentuk usaha bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini seperti bantuan modal usaha dan bantuan ternak dan sebagainya. Adapun kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial di Kecamatan Kanigaran dapat dilihat dari beberapa strategi pekerja sosial seperti:

- a) Meningkatkan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran dalam menghadapi masalah yang dialaminya seperti pembinaan dan bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Seperti meningkatnya kemauan dalam memulai suatu usaha bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti usaha ternak dan membuka usaha-usaha lainnya seperti membuka kios-kios menjual barang-barang toko kelontong. hal ini untuk membantu dalam peningkatan pendapatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Menghubungkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, pelayanan dan kesempatan, dan fungsi ini dalam membantu masyarakat agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, seperti bantuan layanan kesehatan dalam berobat serta bantuan yang didapatkan oleh masyarakat ketika tertimpa musibah yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, angin kencang yang dapat menyebabkan rumah rusak. Anak-anak keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdada dalam mendapatkan beasiswa di sekolah. Sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) khususnya di Kecamatan Kanigaran membantu masyarakat dalam membuat atau mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada pemerintah yang terkait seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk permohonan bantuan modal usaha dan sebagainya. c) Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Kanigaran oleh Dinas Sosial belum diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial di Kecamatan Kanigaran. Sumbangsih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian diserahkan dan ditindaklanjuti oleh dinas sosial. d) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan sebagai Fasilitator, berperan seperti mendorong anggota untuk berbagi dan berpartisipasi secara aktif, mengaitkan isu, gagasan, perasaan, pemikiran. Hal ini masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih terbuka kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam masalah yang dihadapinya. Masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui kehadiran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah mendafta masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran. e) Identifikator, peran ini terlihat ketika Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan Kanigaran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 1. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertujuan untuk menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Kanigaran. 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan aktif dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Kanigaran juga masih kurangnya dukungan, bantuan, pengakuan, dan juga sinergitas antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan pihak pemerintah. 3. Adapun faktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Kanigaran adalah adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), adanya data yang diperlukan di setiap Kelurahan, adanya pekerjaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja dengan baik serta perhatian pemerintah yang sangat respon terhadap program tersebut yaitu dengan diberikannya pada masing-masing Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berupa kendaraan dinas dan gaji yang layak seperti pegawai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). 4. Adapun faktor penghambat adalah disebabkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terlalu luas jangkauan kerjanya yaitu mencakup satu kecamatan masing-masing untuk satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

DAFTAR PUSTAKA

Edy Suhardono. (1994) Teori Peran: Konsep, Implikasi dan Derivasinya; Pengantar Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Jakarta: PT Gramedia.

Suharto, (2005) Membaangun Masyaraakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

Adi, Isbandi Rukminto. (2001) Pemberdayaaan, Pengembaangan Maasyarakat dan Komunitas (Pengaantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Conny Semiawan, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gramedia.

Afifudin. (2010) Pengantar Administrasi Pembangunan, Bandung: Alfabeta.

Berry, David. (1982) Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali. Dinas Sosial Kabupaten Malang, (2000).

Suharto, Edy. (2005) Membaangun Masyaarakat Memberdayaakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

Kartasasmita, G. (1997) Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat. Institut Teknologi Bandung, Bandung: disertasi yang tidak dipublikasikan.

BPS, 2019, Kecamatan Kanigaran dalam Angka 2019, (Kota Probolinggo: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo).